

KKP dan Pertamina Penuhi Kebutuhan BBM dan Gas untuk Masyarakat Pesisir



Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Agus Dermawan (kedua kiri) dengan General Manager MOR VIII Pertamina, Gema Irianus Pahalawan (kedua kanan) berfoto bersama usai meneken nota kerja sama di Kantor KKP, Jakarta.

Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) dan PT Pertamina (Persero) selalu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Upaya itu diwujudkan dengan melakukan kerja sama program dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. KKP dan Pertamina menandatangani kerja sama Sinergi Program Pengelolaan Ruang Laut dengan Pemanfaatan Produk Pertamina di Wilayah Kerja Marketing Operation Region (MOR) VIII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Direktur Jenderal PRL KKP, Brahmantya Satyamuri Poerwadi mengatakan, tujuan perjanjian kerja sama ini dalam rangka Sinergitas Program Pengelolaan Ruang Laut dengan pemanfaatan Produk Pertamina bagi masyarakat pesisir. Ini meliputi nelayan, Pembudidaya ikan, Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kelompok Masyarakat Penggerak.

"Bersama-sama nanti akan dilakukan beberapa kegiatan bagi masyarakat pesisir di wilayah kerja MOR III Pertamina, terkait sinergitas program seperti pengorganisasian

pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas, sosialisasi tentang program pengelolaan ruang laut, dan produk-produk gas domestik, pemasangan produk Musicool, pertukaran data dan informasi dan kegiatan lainnya," kata Brahmantya di Jakarta, Rabu (25/9/2019). Sementara itu Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas'ud Khamid menjelaskan, perjanjian kerja sama ini adalah guna meningkatkan sinergi program pengelolaan ruang laut dengan pemanfaatan produk Pertamina bagi masyarakat pesisir. "Pertamina terus mendorong sinergi dengan stakeholder khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat pesisir di Wilayah Timur Indonesia," kata Mas'ud. Mas'ud menambahkan, bahwa kerja sama di wilayah Timur Indonesia ini adalah pionir atau pilot project. Namun tidak menutup kemungkinan, jika dikemudian hari dipandang perlu dilakukan penerapan kerja sama untuk seluruh wilayah Indonesia.